PEMERINTAH KOTA TEGAL

RENCANA STRATEGIS
2025 - 2029

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA TEGAL

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis ini disusun dengan format dan sistematika sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra 2025 – 2029 ini disusun sesuai Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025, tanggal 27 Maret 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Penyusunan perencanaan dan perumusan program beserta indikatornya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2025 - 2029. Penyusunan Renstra ini telah berupaya memperhatikan permasalahan dalam urusan wajib pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang saat ini terjadi maupun masa mendatang dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan wajib pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kurun waktu 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk menjamin kesinambungan, sinergitas dan konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program selama lima tahun, serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan dalam urusan wajib pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Tegal, serta dapat dimanfaatkan oleh pelaku pembangunan pada tataran pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 - 2029. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan ridho kepada kita semua dalam menjalankan tugas pembangunan.

Tegal, 18 September 2025

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

Ir. EKO SETYAWAN, MUM
NIP. 19650925 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7
2.2. Sumber Daya Pada Perangkat Daerah 8
2.3. Mitra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal 11
2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal 12
2.5. Standar Pelayanan Minimal 27
2.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 28
2.7. Isu-Isu Strategis 32

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 35
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 35
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan 43

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 54
4.1. Rencana Program dan Kegiatan 54
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 67

BAB V PENUTUP 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 9

Tabel 2.2. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin 9

Tabel 2.3. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin 9

Tabel 2.4. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal 10

Tabel 2.5. Prasarana dan Sarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 10

Tabel 2.6. Lokasi Kelurahan Kumuh Kota Tegal Tahun 2021 14

Tabel 2.7. Data Luas Kawasan Kumuh di Kota Tegal Akhir Tahun 2024 14

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2020 - 2024 15

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2020 – 2024 26

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 36

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal 45

Tabel 3.3. Cascading Atas Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kawasan 46

Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan 59

Tabel 4.2. Metadata (Formulasi) Indikator Tujuan 66

Tabel 4.3. Metadata (Formulasi) Indikator Sasaran 66

Tabel 4.4. Metadata (Formulasi) Program 66

Tabel 4.5. Penetapan Indikator Kinerja Utama 69

Tabel 4.6. Penetapan Indikator Kinerja Kunci 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 8

Gambar 4.1. Pohon Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 68

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Paradigma perencanaan pembangunan yang harmonis dan selaras, antara pusat dengan daerah, antara daerah dengan daerah, dan antara instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis antar daerah dan fungsi pemerintahan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kota Tegal Tahun 2025 - 2029 seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 – 2029.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 - 2029 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan serta menyelaraskan dengan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 khususnya pasal 7 (1) bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 menegaskan bahwa :

1. Perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD;
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;

3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaikan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang di tetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh;
7. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;
8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2026;
11. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;

12. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tanggal 27 Maret 2025, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
15. Surat Edaran Wali Kota Tegal Nomor 000.7.6.1/001 Tanggal 21 April 2025 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memudahkan dan sebagai pedoman penyusunan dalam perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan, anggaran perangkat daerah dan pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025-2029.
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
4. Menjadi pedoman dalam pengendalian kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas terutama dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
2. Menjamin kesinambungan, sinergitas, dan konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kegiatan selama 5 tahun dengan RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029.
3. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal kurun waktu 2025-2029;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan dan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memaparkan tugas, fungsi, struktur organisasi, kondisi sumber daya yang dimiliki dan kinerja pelayanan yang telah dicapai, serta standar pelayanan minimal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal.

Bab ini juga berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra kementerian/instansi pemerintah pusat yang terkait dan Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, strategi dan kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal sampai lima tahun ke depan.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memaparkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja, kelompak sasaran dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan serta menjelaskan hubungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal.

BAB V : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mempunyai tugas pokok ***membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman***.

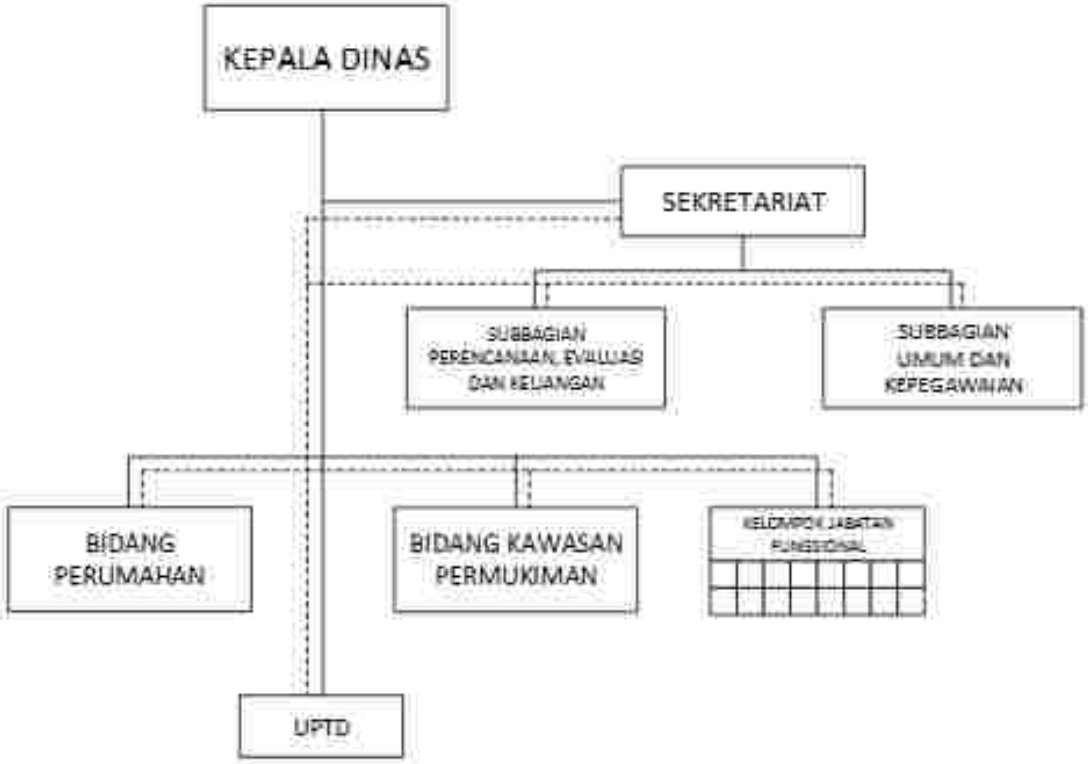
2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman;
d. pembinaan dan fasilitasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
f. pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

2.2. Sumber Daya Pada Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan dan mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal mempunyai sumber daya manusia sebanyak 35 pegawai, yang terdiri dari 26 orang PNS, 2 orang PPPK dan 7 orang Supporting Staf. Selain itu juga terdapat tenaga kebersihan sejumlah 12 orang dan tenaga keamanan sejumlah 17 orang yang menggunakan jasa penyedia tenaga outcourcing.

Pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit kerja	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kepala Dinas	1	2,86	0	-	1
2	Sekretariat	9	25,71	3	8,57	12
3	Bidang Perumahan	9	25,71	3	8,57	12
4	Bidang Kawasan Permukiman	2	5,71	2	5,71	4
5	UPTD Pengelolaan Rusunawa	4	11,43	2	5,71	6
	Jumlah	**25**	**71,43**	**10**	**28,57**	**35**

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin

No.	Eselon	Jumlah (Orang)		Persentase (%)	
		L	P	L	P
1	Eselon II.b	1	-	33,34	-
2	Eselon III.a	-	-	-	-
3	Eselon III.b	1	-	33,33	-
4	Eselon IV.a	1	-	33,33	-
	Jumlah	**3**	**0**	**100**	**0**

Tabel 2.3.
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No.	Eselon	Jumlah (Orang)		Persentase (%)	
		L	P	L	P
1	Golongan IV	2	-	5,71	-
2	Golongan III	7	4	20,00	11,43
3	Golongan II	10	-	28,57	-
4	Golongan I	4	-	11,43	-
5	Non Golongan	2	6	5,71	17,14
	Jumlah	**25**	**10**	**71,43**	**28,57**

Kondisi kompetensi pegawai yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal dapat dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir pegawai yang jumlahnya masing-masing dapat dilihat Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Jenjang Pendidikan Formal	Laki-laki		Perempuan	
		Orang	%	Orang	%
1	Sarjana (S2)	2	5,71	-	-
2	Sarjana (S1)	7	20,00	4	11,43
3	D IV	1	2,86	-	-
4	D III	4	11,43	4	11,43
5	SLTA	5	14,29	2	5,71
6	SLTP	2	5,71	-	-
7	SD	4	11,43	-	-
	Jumlah	**25**	**71,43**	**10**	**28,57**

2.2.2. Sumber Daya Aset

Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal menempati lahan seluas ± 1.000 m2 dengan ditunjang sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

No.	Jenis	Jumlah
1.	Gedung Kantor	1 unit
2.	Gedung Rusunawa	5 blok
3.	Kendaraan Station	2 unit
6.	Kendaraan Roda Dua	7 unit
7.	Laptop	6 unit
8.	Komputer	17 unit
9.	TV Proyektor	2 unit
10.	Air Conditioner (AC)	15 unit

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2025

Gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal terletak di Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 11, Komplek Balaikota Tegal, sedangkan untuk Gedung Rusunawa terletak di Kelurahan Kraton yang berjumlah 3 *twinblock* (294 unit hunian) dan Rusunawa Tegalsari 2 blok yaitu Rusun Prototype (12 unit hunian) dan Rusun Reguler untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (54 unit hunian).

2.3. Mitra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan OPD teknis terkait serta melakukan sinkronisasi dan sinergitas program dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Berikut ini adalah beberapa OPD Teknis Pemerintah Daerah yang turut serta membantu tugas dan fungsi dinas :

1. Bapperida

   Peran serta Bapperida dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai perencanaan dan penganggaran dalam penanganan kumuh serta penyediaan perumahan.

2. Dinas Lingkungan hidup

   Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tupoksinya membantu dalam penanganan kekumuhan untuk kriteria pengelolaan persampahan.

3. Dinas Kesehatan

   Kontribusi Dinas Kesehatan dalam membantu penanganan kekumuhan adalah pada kriteria pengelolaan air limbah dan sanitasi lingkungan dengan program jambanisasi menuju Kota Tegal Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah berkolaborasi dalam program penanganan kekumuhan pada kriteria bangunan gedung, kriteria jalan lingkungan, kriteria drainase lingkungan dan kriteria pengelolaan air limbah.

5. PDAM

   PDAM berkolaborasi dalam penanganan kekumuhan pada kriteria penyediaan air minum dengan program Penyediaan Akses Air Minum, Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Sambungan Rumah (SR).

6. Satpol PP

   Salah satu kriteria penanganan kumuh adalah kriteria proteksi kebakaran, dalam hal ini adalah Satpol PP yang membantu dalam program Pengadaan Hidran/Mobil Pemadam Kebakaran/APAR.

Agar upaya penanganan kekumuhan serta penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Tegal yang melibatkan OPD teknis berjalan tertib dan lancar maka dibentuk suatu kelompak kerja yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Tegal. Dengan adanya SK Walikota Tegal diharapkan adanya kolaborasi antar OPD teknis di lingkungan Pemerintah Kota Tegal untuk bersama-sama berkomitmen dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan serta penanganan kumuh di Kota Tegal.

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Walikota Tegal Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal mempunyai tugas urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2025-2029 dan Renstra 2025-2029, yaitu persentase rumah tangga dengan akses hunian layak.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi badan terpadu. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan kawasan permukiman tersebut bertujuan untuk memenuhi

hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Permukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari deretan lima kebutuhan hidup manusia yaitu pangan, sandang, permukiman, pendidikan dan kesehatan, nampak bahwa permukiman menempati posisi yang sentral, dimana peningkatan permukiman akan meningkatkan pula kualitas hidup manusia.

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya.

Kebutuhan perumahan dan permukiman menjadi salah satu indikator dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Sustainable Development Goals (SDG's). Harapannya pemerintah dapat menjamin akses bagi semua rakyat terhadap perumahan yang layak, aman dan terjangkau dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh.

Pada akhir tahun 2020, Kota Tegal melaksanakan deliniasi kawasan kumuh sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Berdasarkan perhitungan deliniasi kawasan kumuh di Kota Tegal terdapat 10 Kelurahan yang masuk ke dalam kategori kumuh. Sepuluh kelurahan ini telah ditetapkan oleh SK Walikota Tegal No. 648/061/2021 tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Lokasi Kelurahan Kumuh Kota Tegal Tahun 2021

No	Kelurahan	Kecamatan	Luasan Kumuh (Ha)	Tingkat Kekumuhan
1	Margadana	Margadana	61,19	Kumuh Ringan
2	Pesurungan Lor	Margadana	6,53	Kumuh Ringan
3	Sumur Panggang	Margadana	38,09	Kumuh Ringan
4	Tegalsari	Tegal Barat	7,32	Kumuh Ringan
5	Bandung	Tegal Selatan	55,23	Kumuh Ringan
6	Debong Tengah	Tegal Selatan	16,20	Kumuh Ringan
7	Randugunting	Tegal Selatan	15,95	Kumuh Ringan
8	Mintaragen	Tegal Timur	5,04	Kumuh Ringan
9	Panggung	Tegal Timur	1,90	Kumuh Ringan
10	Slerok	Tegal Timur	6,97	Kumuh Ringan
	TOTAL		**214,42**	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2021

Luasan kawasan kumuh di Kota Tegal dari tahun 2021 hingga akhir tahun 2024 bertahap mengalami penurunan menjadi 37,80 Ha atau sebesar 0,95% dari luas Kota Tegal. Data luasan kawasan kumuh sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7.
Data Luas Kawasan Kumuh di Kota Tegal Akhir Tahun 2024

No.	Kelurahan	Kecamatan	Luas Kawasan Kumuh (Hektar)
1	Margadana	Margadana	12,25
2	Pesurungan Lor	Margadana	0,00
3	Sumurpanggang	Margadana	5,50
4	Bandung	Tegal Selatan	20,05
5	Mintaragen	Tegal Timur	0,00
	TOTAL		**37,80**

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, 2024

Pada akhir tahun 2024 persentase luasan perumahan dan permukiman layak huni adalah 57,95% dari luas Kota Tegal atau seluas 2.268,16 hektar (57,95% x 3.914 hektar).

Tabel 2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2020 - 2024

NO.	NAMA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					PROSENTASE CAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
T1	**Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak**	**Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak**	**Persen**	-	77,29	77,53	77,76	77,99	77,66	77,78	78,56	78,91	79,49	-	100,63	101,33	101,48	101,52
S1	**Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Persentase luasan perumahan dan permukiman layak huni**	**Persen**	49,22	47,98	51,03	53,85	64,34	29,96	49,07	51,89	57,24	57,95	60,88	102,27	101,70	106,30	90,07
P1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Penyediaan Hunian Yang Layak**	**Persen**	-	-	-	-	-	0,03	0,14	0,15	0,16	0,17	-	-	-	-	-
A.	**Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Pendataan Rumah Korban Bencana dan Rumah Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Terfasilitasi**	**Persen**	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
1.	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	100	100	100
2.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	100	100	100
B.	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terfasilitasi**	**Persen**	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
1.	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	-	-	-	11	14	-	-	-	11	7	-	-	-	100	50

NO.	NAMA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					PROSENTASE CAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
C	**Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
D.	**Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
P2	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Luasan Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**	**Persen**	**2,21**	**2,26**	**2,31**	**2,36**	**2,41**	**2,21**	**2,29**	**2,34**	**2,39**	**2,44**	**100**	**101,33**	**101,30**	**101,27**	**101,24**
A.	**Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

NO.	NAMA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					PROSENTASE CAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP Yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
B	**Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
2.	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Hektar	-	-	-	0,90	0,20	-	-	-	32,98	0,20	-	-	-	3.664	100
P3	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**Persen**	**87,11**	**87,81**	**97,72**	**98,04**	**98,36**	**87,22**	**98,73**	**98,81**	**98,83**	**98,84**	**100,13**	**112,44**	**101,12**	**100,81**	**100,49**
A	**Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukimah Kumuh Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	349	327	481	513	465	349	326	481	513	464	100	99,69	100	100	99,78

NO.	NAMA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					PROSENTASE CAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
P4	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan PSU Perumahan**	**Persen**	**18,84**	**27,11**	**35,59**	**44,07**	**52,54**	**24,29**	**32,39**	**42,42**	**50,79**	**63,49**	**130,31**	**119,48**	**101,12**	**115,25**	**120,84**
A.	**Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1	1	1	1	15	1	1	1	1	15	100	100	100	100	100
2.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	-	20	30	13	22	0	20	30	13	22	-	100	100	100	100
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	5	5	5	1	5	5	6	5	1	5	100	120	100	100	100
S2	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	-	-	-	-	-	-	-	64,90	64,90	68,65	-	-	-	-	-
P1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kematangan Organisasi**	**Nilai**	-	-	-	-	-	-	-	37	36	35	-	-	-	-	-
A.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	2	4	3	3	3	2	4	3	100	100	100	100	100

NO.	NAMA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					PROSENTASE CAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
B	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	-	-	-	38	30	-	-	-	32	30	-	-	-	84,21	100
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
C.	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
D.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	80	100	100	100	100
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	55	47	37	38	37	55	47	37	38	35	100	100	100	100	94,59

NO.	NAMA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					PROSENTASE CAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30	26	25	35	34	30	26	25	35	34	100	100	100	100	100
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	100	100	100	100	50
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	6	6	5	4	6	6	6	5	4	85,71	100	100	100	100
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
E	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
F	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	12	11	11	9	21	12	11	11	9	100	100	100	100	100

NO.	NAMA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI					PROSENTASE CAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	40	29	66	64	58	38	29	66	48	54	95	100	100	75	93,10
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	100	100	100	100	100
G.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**	**0**	**-**	**100**	**100**	**100**	**0**
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	-	2	2	18	10	-	2	2	328	0	-	100	100	1.822	0

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Perumahan**

   Program pengembangan perumahan dengan indikator kinerja prosentase penyediaan hunian yang layak adalah sebuah indikator baru yang realisasinya ada tapi targetnya tidak ada yang sebelumnya indikator yang digunakan adalah prosentase rumah tangga dengan akses hunian layak yang kini telah menjadi indikator tujuan perangkat daerah. Selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 indikator kinerja prosentase rumah tangga dengan akses hunian layak realisasinya telah dapat melampaui target yang ditetapkan, yaitu dari target akhir adalah 77,99% dan realisasinya adalah 79,49% dengan prosentase capaiannya adalah 101,92%.

   Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator adalah:

   - Fasilitasi penghunian rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tegal, yaitu Rusunawa Kraton dengan 3 twin blok yang berisi 294 unit hunian dan Rusunawa Tegalsari 1 blok yang berisi 54 unit hunian.
   - Bekerja sama dengan Pemerintah Jepang via JICA (Japan International Corporation Agency) dalam penelitian dan pengelolaan rumah susun eksperimental bebas karbon sebanyak 12 unit hunian di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
   - Pelayanan izin pengesahan site plan perumahan bagi para pengembang perumahan formal.
   - Pembangunan rumah baru dengan model Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN), yaitu pemberian bantuan pembangunan rumah baru bagi warga Kota Tegal yang belum memiliki rumah tetapi memiliki lahan siap bangun.

2. Program Kawasan Permukiman

Program kawasan permukiman memiliki indikator kinerja persentase luasan pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh. Selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 indikator ini realisasinya telah dapat melampaui target yang ditetapkan, yaitu dari target akhir adalah 2,41% dan realisasinya adalah 2,44%, dengan prosentase capaiannya adalah 101,24%.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator persentase luasan pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh adalah :

- Penyusunan dokumen kebijakan/perencanaan bidang permukiman;
- Pembangunan/pemeliharaan jalan dalam bentuk pavingisasi jalan lingkungan;
- Penataan/pemeliharaan Kawasan Bantaran Sungai Siwatu (Promanade Siwatu);
- Pembangunan Prasarana dan Sarana Drainase Lingkungan di Kelurahan Sumurpanggang yang didanai dari Bankeu APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Pemberian bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni di kawasan permukiman kumuh yang bersumber dari DAK 2021 sejumlah 59 unit dan juga dari APBD Kota Tegal untuk kawasan kumuh maupun kawasan tidak kumuh.
- Berkolaborasi dengan perangkat daerah lain dalam wadah Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dalam pencegahan dan penanganan permukiman kumuh. OPD tersebut yaitu Bapperida, DPU, DLH, Dinkes, Satpol PP dan PDAM.
- Pendampingan oleh Tim Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), yaitu tim yang dibentuk oleh Dirjen Ciptakarya Kementerian Pekerjaan Umum untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh.

3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program perumahan dan kawasan permukiman memiliki indikator kinerja persentase rumah layak huni. Selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 indikator ini realisasinya telah dapat melampaui target yang ditetapkan, yaitu dari target akhir adalah 98,36% dan realisasinya adalah 98,84%, dengan prosentase capaiannya adalah 100,49%.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator persentase rumah layak huni adalah memfasilitasi pemberian bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tegal. Adapun sumber dana pemberian bantuan rehab RTLH adalah sebagai berikut :

- APBD Kota Tegal;
- Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Dana Corporate Social Rosponsibility (CSR) atau Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) seperti Bank Jateng dan Pelindo;
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
- Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS);
- Dan lembaga sosial lainnya.

Data fasilitasi rehab rumah tidak layak huni dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2020 sebanyak 349 unit
- Tahun 2021 sebanyak 326 unit
- Tahun 2022 sebanyak 481 unit
- Tahun 2023 sebanyak 513 unit
- Tahun 2024 sebanyak 464 unit

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum memiliki indikator Cakupan PSU Perumahan. Selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 indikator ini realisasinya telah dapat melampaui target yang ditetapkan, yaitu dari target akhir adalah 52,54% dan realisasinya adalah 63,49%, dengan prosentase capaiannya adalah 120,84%.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator cakupan PSU perumahan adalah sebagai berikut :

- Serah terima PSU perumahan dari para pengembang perumahan;
- Pemeliharaan PSU perumahan yang telah diserahkan dari para pengembang, yaitu diantaranya pemeliharaan jalan paving/aspal dan pemeliharaan saluran air/drainase; dan
- Pembangunan/pemeliharaan prasarana dan sarana pemakaman.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki indikator Indeks Kematangan Organisasi. Selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 indikator ini belum ditetapkan targetnya karena ini merupakan indikator baru, akan tetapi terdapat capaian untuk angka indeks kematangan organisasi, yaitu :

- Tahun 2022 dengan indeks kematangan organisasinya adalah 37
- Tahun 2023 dengan indeks kematangan organisasinya adalah 36
- Tahun 2024 dengan indeks kematangan organisasinya adalah 35

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai nilai indeks kematangan organisasi yaitu :

- Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah;
- Pelaksananaan administrasi barang pada perangkat daerah;
- Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah;
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- Pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
- Pengadaan barang penunjang urusan pemerintahan daerah.

Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun (rupiah)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (rupiah)					Prosentase Realisasi Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Pengembangan Perumahan	8.112.531.000	705.421.300	210.407.700	861.383.300	680.388.150	6.004.222.500	699.257.470	209.947.237	902.998.256	687.240.372	99,23	99,12	99,79	95,12	99,84
2	Program Kawasan Permukiman	-	1.429.721.200	1.804.947.300	2.311.630.779	1.314.780.709	-	1.379.958.420	1.697.877.893	1.908.883.091	1.389.090.348	-	96,58	99,56	84,75	91,73
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	5.290.552.000	6.369.199.800	8.845.688.500	10.743.036.750	5.858.319.250	5.144.592.500	5.999.122.900	8.841.461.000	10.735.375.500	5.791.709.500	59,55	96,31	99,95	99,93	99,52
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	116.355.000	5.237.099.125	4.362.134.419	2.575.315.979	4.285.779.483	85.872.400	3.162.715.399	4.341.655.500	2.442.954.243	4.215.910.552	73,46	97,34	99,53	95,34	98,46
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.700.058.000	6.585.572.270	5.673.779.516	5.786.140.034	6.029.572.750	2.371.808.804	7.548.535.424	5.379.630.105	5.305.867.048	5.634.679.225	96,32	97,79	94,82	91,70	93,45

Dari tabel 2.9 dapat kita ketahui bahwa capaian realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal selama kurun waktu 2020-2024 tidak mencapai 100% namun jika dihitung rata-rata rasio realisasi anggaran sebesar 93,28%, selisih hasil capaian tersebut rata-rata terjadi karena selisih lebih anggaran (SILPA). Beberapa program di Tahun 2020 realisasinya di bawah 80%, hal ini terjadi karena pada tahun tersebut terjadi pandemi Colvid-19 yang berpengaruh terhadap beberapa program yang ada, yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

2.5. Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagian Kelima Pasal 8 tentang SPM Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kota Tegal di Tahun 2020 - 2024 sudah terdapat program yang mengakomodir kegiatan untuk memenuhi standar pelayanan minimal tersebut. Program tersebut yaitu Program Pengembangan Perumahan, sedangkan kegiatannya adalah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota outputnya adalah pendataan saja yang dilaksanakan setiap tahun.

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang sudah dilaksanakan kegiatan fisiknya adalah Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota. Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan di Tahun 2023 sebanyak 11 unit dan 14 unit di Tahun 2024. Pembangunan rumah tersebut adalah pembangunan Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tegal yang belum memiliki rumah tetapi memiliki lahan siap bangun yang diantaranya adalah masyarakat yang tinggal di Rusunawa Kota Tegal yang akan habis masa kontrak sewanya. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana belum melaksanakan pekerjaan fisik karena di Kota Tegal tidak terdapat rumah yang menjadi korban bencana tingkat kabupaten/kota.

2.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pemenuhan kebutuhan akan rumah di dalam kawasan permukiman menjadi isu yang terus mencuat saat ini. Pengembangan permukiman di perkotaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni *(visible)*, aman *(safe)*, nyaman *(comfortable)*, damai *(peaceful)* dan sejahtera *(prosperous)* serta berkelanjutan *(susfainable)*. Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut.

1. Tingginya Backlog Kepemilikan Rumah di Kota Tegal

Angka Backlog kepemilikan rumah di Kota Tegal sebesar 17.584 unit pada tahun 2024 berdasarkan data dari BKKBN, Disdukcapil Kota Tegal dan Kota Tegal dalam angka 2023. Hal ini disebabkan karena terbatasnya lahan di wilayah Kota Tegal untuk pembangunan/pengembangan perumahan dan permukiman.

2. **Masih Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni**

Jumlah rumah tidak layak huni di Kota Tegal pada Tahun 2024 sebanyak 778 unit berdasarkan perhitungan database awal yang telah dikurangi dengan penanganan RTLH yang telah dilakukan.

3. **Masih Terdapat Kawasan Kumuh Yang Belum Tertangani**

Luas kawasan kumuh di Kota Tegal pada awal Tahun 2021 adalah seluas 214,42 hektar yang telah dilegalkan dengan SK Walikota Tegal No. 648/061/2021 Tahun 2021. Selama Tahun 2021 hingga Tahun 2024 telah dilakukan penanganan luasan permukiman kumuh sehingga pada akhir Tahun 2024 tersisa seluas 37,80 hektar.

4. **Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Perumahan Yang Belum Sepenuhnya Tertangani**

Masih terdapat PSU Perumahan yang rusak dan belum diperbaiki/tidak terpelihara dengan baik yang diantaranya adalah PSU Perumahan yang belum diserahkan oleh pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Tegal.

2.6.1. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Prioritas Daerah adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal-hal penting lainnya.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas *(clarity of direction)* tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kota Tegal yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Tegal selama lima tahun (2025 - 2029) adalah sesuai visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yaitu : "*Tegal Berdikari dan Sejahtera, Menjadi Kota Idaman*".

Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Tegal selama lima tahun adalah sesuai visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yaitu :

1. Melanjutkan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Disiplin, Kompeten Adaptif dan Inovatif;
2. Mengentaskan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Masyarakat Tidak Mampu, Serta Kelompok Rentan Lainnya dengan Menciptakan Lapangan Pekerjaan, dan Membangun Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Keadilan yang Mendorong Kemajuan Kota Tegal Sebagai Kota Bahari;
3. Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Menyongsong Indonesia Emas 2045;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan di Segala Bidang dengan Tetap Mengutamakan Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Membuka Akses Investasi, Pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Guna Pertumbuhan Ekonomi;
6. Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Menuju Keluarga Sehat, Sejahtera, Mandiri dan Berkualitas;
7. Memperkuat Moderasi Beragama dalam Kerukunan Antar Umat Beragama.

Berdasarkan telaah terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan misi kedua yaitu :

"Mengentaskan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Masyarakat Tidak Mampu, Serta Kelompok Rentan Lainnya dengan Menciptakan Lapangan Pekerjaan, dan Membangun Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Keadilan yang Mendorong Kemajuan Kota Tegal Sebagai Kota Bahari."

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kota Tegal Tahun 2025-2029 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tegal Tahun 2025-2029 meliputi 11 (sebelas) tujuan dan 25 (dua puluh lima) sasaran. Tujuan yang terkait dengan tupoksi Disperkim adalah tujuan ke **2.1. Menurunnya angka kemiskinan**, sedangkan sasarannya adalah sasaran ke **2. Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak.**

Dengan adanya tujuan dan sasaran Kota Tegal yang berkaitan dengan tupoksi Disperkim, Disperkim Kota Tegal juga mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025-2029. Tujuannya yaitu **Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak** dengan indikator kinerjanya adalah **persentase rumah tangga dengan akses hunian layak**, sedangkan sasarannya yaitu :

1) Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dengan indikator kinerja persentase luasan perumahan dan permukiman layak huni;
2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan indikator kinerja nilai AKIP Perangkat Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Disperkim Kota Tegal memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut juga berkaitan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 – 2029. Adapun IKU Disperkim Kota Tegal adalah :

1) Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak; dan
2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mencapai target kinerja perangkat daerah sesuai indikator kinerja utama yaitu :

1) Meningkatkan jumlah rumah layak huni
   a) Menyediakan hunian berupa rumah susun, ruspin dan fasilitasi pembangunan rumah baru oleh pengembang; dan
   b) Rehabilitasi rumah tidak layak huni.
2) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
   a) Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dan kawasan permukiman yang berpotensi menjadi kawasan permukiman kumuh baru;
   b) Memfasilitasi penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas bagi perumahan formal.
3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan ketertiban administrasi umum dan administrasi keuangan.

2.7. Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

2.7.1. Isu Nasional (RPJMN Tahun 2025-2029)

Isu strategis di Pulau Jawa

1. Kawasan perkotaan dan metropolitan yang menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah di sekitarnya;
2. Rendahnya penggunaan teknologi dalam sektor industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah;
3. Kesenjangan keterampilan dan mismatch antara pendidikan – industri;
4. Prevalensi stunting, wasting dan underweight masih relative tinggi;
5. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

2.7.2. Isu Regional (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029)

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Penurunan tingkat kemiskinan;
3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan;
4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana;
6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;
7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat;
8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

2.7.3. Isu Strategis Kota Tegal (RPJMD Kota Tegal 2025-2029)

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government);
2. Masih terdapat masyarakat miskin di Kota Tegal;
3. Belum meratanya pembangunan wilayah dan pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan infrastruktur;
4. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia Kota Tegal;
5. Belum optimalnya investasi yang masuk di Kota Tegal, pengelolaan sektor UMKM, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan sektor pariwisata;
6. Belum optimalnya pembangunan kesetaraan dan keadilan gender;
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan stunting di Kota Tegal;
8. Belum optimalnya adaptasi terhadap perubahan iklim;
9. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi; dan
10. Belum optimalnya penanganan kondusifitas, keamanan dan ketertiban wilayah.

2.7.4. Isu Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Tegal

Isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis Kota Tegal yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal adalah penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat salah satunya adalah dengan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagaimana telah diuraikan dalam tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Tegal, serta pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan pembangunan di segala bidang, maka dapat diidentifikasikan permasalahan terkait isu strategis yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Masih banyaknya backlog kepemilikan rumah maupun backlog penghunian rumah;
2. Masih banyaknya rumah tidak layak huni;
3. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh;
4. Prasarana dan sarana umum perumahan yang belum sepenuhnya tertangani.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.1.1. Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

Tujuan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal adalah **Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak**. Untuk mencapai tujuan yang direncanakan maka diperlukan program atau kegiatan pendukung dalam pencapaian tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal. Langkah-langkah yang hendak dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal untuk dapat mencapai tujuan tersebut, yaitu :

1. Mamfasilitasi penyediaan dan penghunian rumah yang layak;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hunian;
3. Meningkatkan kualitas perumahan demi terwujudnya rumah layak huni;
4. Meningkatkan prasarana dan sarana perumahan dan infrastruktur permukiman;

3.1.2. Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran maka dibutuhkan program dan kegiatan yang berisi target kinerja yang akan dicapai dan rencana anggaran yang dibutuhkan.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS	TUJUAN & INDIKATOR TUJUAN	SASARAN & INDIKATOR SASARAN	PROGRAM & INDIKATOR OUTCOME	KEGIATAN & INDIKATOR OUTPUT	SUB KEGIATAN & INDIKATOR OUTPUT
1	Masih Banyaknya Backlog Kepemilikan Rumah Maupun Backlog Penghunian Rumah	Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Pengurangan backlog	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	Persentase luasan perumahan dan permukiman layak huni	Persentase penyediaan hunian yang layak		Jumlah dokumen data rumah di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota
					Persentase pendataan rumah korban bencana dan rumah terdampak relokasi program kabupaten/kota terfasilitasi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
						Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/kota
					Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
						Jumlah rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota
					Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota terfasilitasi	

NO.	PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS	TUJUAN & INDIKATOR TUJUAN	SASARAN & INDIKATOR SASARAN	PROGRAM & INDIKATOR OUTCOME	KEGIATAN & INDIKATOR OUTPUT	SUB KEGIATAN & INDIKATOR OUTPUT
					Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
					Persentase pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus terfasilitasi	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus
					Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
					Persentase penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terfasilitasi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan
2.	Masih Terdapat Kawasan Permukiman Kumuh			Program Kawasan Permukiman	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman			Persentase luasan pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh	Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang terfasilitasi	Jumlah dokumen hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh

NO.	PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS	TUJUAN & INDIKATOR TUJUAN	SASARAN & INDIKATOR SASARAN	PROGRAM & INDIKATOR OUTCOME	KEGIATAN & INDIKATOR OUTPUT	SUB KEGIATAN & INDIKATOR OUTPUT
					Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
					Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang terfasilitasi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh
						Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
						Luas permukiman kumuh yang dipugar
3.	Masih Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Rehab rumah tidak layak huni			Persentase rumah layak huni	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukimah kumuh yang terfasilitasi	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha yang diperbaiki

NO.	PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS	TUJUAN & INDIKATOR TUJUAN	SASARAN & INDIKATOR SASARAN	PROGRAM & INDIKATOR OUTCOME	KEGIATAN & INDIKATOR OUTPUT	SUB KEGIATAN & INDIKATOR OUTPUT
4.	Prasarana dan Sarana Umum Perumahan Yang Belum Sepenuhnya Terfangani			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
	Pemeliharaan PSU perumahan			Cakupan PSU perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan terfasilitasi	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
						Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
						Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan
5.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Yang Belum Memuaskan		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Upaya meningkatkan nilai AKIP		Nilai AKIP perangkat daerah	Indeks kematangan organisasi		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terfasilitasi	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
						Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD

NO.	PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS	TUJUAN & INDIKATOR TUJUAN	SASARAN & INDIKATOR SASARAN	PROGRAM & INDIKATOR OUTCOME	KEGIATAN & INDIKATOR OUTPUT	SUB KEGIATAN & INDIKATOR OUTPUT
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
					Persentase administrasi keuangan terfasilitasi	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
					Persentase administrasi barang milik daerah yang terfasilitasi	
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
					Persentase administrasi umum yang terfasilitasi	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

NO.	PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS	TUJUAN & INDIKATOR TUJUAN	SASARAN & INDIKATOR SASARAN	PROGRAM & INDIKATOR OUTCOME	KEGIATAN & INDIKATOR OUTPUT	SUB KEGIATAN & INDIKATOR OUTPUT
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
						Fasilitasi Kunjungan Tamu
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Persentase penyediaan jasa penunjang yang terfasilitasi	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

NO.	PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS	TUJUAN & INDIKATOR TUJUAN	SASARAN & INDIKATOR SASARAN	PROGRAM & INDIKATOR OUTCOME	KEGIATAN & INDIKATOR OUTPUT	SUB KEGIATAN & INDIKATOR OUTPUT
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terfasilitasi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya
					Persentase pengadaan barang milik daerah yang terfasilitasi	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan terkait isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

3.2.1. Strategi

Berikut adalah strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan :

1. Meningkatnya rumah layak huni

   Strategi meningkatkan rumah layak huni di Kota Tegal adalah dengan memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin/masyarakat berpenghasilan rendah melalui fasilitasi penghunian di rumah susun sederhana sewa, pemberian bantuan rehab rumah tidak layak huni dan fasilitasi pembangunan rumah baru berupa Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) bagi masyarakat Kota Tegal yang belum memiliki rumah tetapi memiliki lahan siap bangun.

2. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

   Strategi meningkatkan kualitas lingkungan permukiman adalah dengan melakukan pencegahan dan penanganan (pemugaran/peremajaan) kawasan permukiman kumuh dan pembangunan/peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan/permukiman.

3.2.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi pembangunan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyediaan hunian berupa Rumah Susun dan Ruspin bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan data RTLH dan data kemiskinan;
3. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan berpotensi kumuh;
4. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan bagi perumahan formal.

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Penyediaan Hunian Berupa Rumah Susun dan Ruspin Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
			Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Data RTLH dan Data Kemiskinan
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dan Berpotensi Kumuh
			Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Bagi Perumahan Formal

Tabel 3.3. Cascading Atas Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak					**Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak**	**Persen**	**81,32**	**82,00**	**82,68**	**83,36**	**84,04**	**84,72**
	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman				**Persentase luasan perumahan dan permukiman layak huni**	**Persen**	**58,85**	**59,89**	**48,64**	**45,16**	**49,79**	**50,43**
		Program Pengembangan Perumahan			**Persentase Penyediaan Hunian Yang Layak**	**Persen**	**2,11**	**4,21**	**6,32**	**8,42**	**10,53**	**12,63**
			Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		**Persentase Pendataan Rumah Korban Bencana dan Rumah Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1
			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	4	5	5	5	5	5
			Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		**Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Laporan	1	1	1	1	1	1
			Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		**Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	1
		Program Kawasan Permukiman			**Persentase Luasan Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**	**Persen**	**2,47**	**2,50**	**2,52**	**2,55**	**2,57**	**2,60**
			Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		**Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1	1	1	1	1
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		**Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	1	1	1	1
				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Hektar	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			**Persentase Rumah Layak Huni**	**Persen**	**97,84**	**97,88**	**97,93**	**97,97**	**98,01**	**98,06**
			Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukimah Kumuh Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	308	155	170	195	230	270
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)			**Cakupan PSU Perumahan**	**Persen**	**65,00**	**67,00**	**69,00**	**71,00**	**73,00**	**75,00**
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		**Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	19	20	20	20	20	20
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	19	20	20	20	20	20
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	7	6	6	6	6	6

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan				**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**68,75**	**68,85**	**68,95**	**69,15**	**69,35**	**69,55**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			**Indeks Kematangan Organisasi**	**Nilai**	**36**	**37**	**38**	**38**	**39**	**39**
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	3	3	3	3	3
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2	2
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Keuangan Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	35	35	35	35	35	35
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	12	12	12

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Administrasi Umum Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	5	5	5	5
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	37	37	37	37	37	37
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	34	34	34	34	34	34
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	1	1	1	4
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	12	12
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	3	3	3
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	9	9	9	9
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	60	60	60	60	60	60
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terfasilitasi**	**Persen**	100	100	100	100	100	100
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	2	9	4	9	4	9

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.

4.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program-program yang telah ditetapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dengan pembiayaan dari APBD Kota Tegal, yang meliputi :

1. Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan ditujukan untuk mengurangi backlog penghunian maupun backlog kepemilikan rumah. Upaya untuk mengurangi backlog penghunian rumah dilakukan dengan fasilitasi penghunian di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sedangkan untuk mengurangi backlog kepemilikan rumah dipenuhi dengan fasilitasi pembangunan rumah baru oleh pengembang dan fasilitasi pembangunan Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) bagi MBR yang memiliki lahan kosong siap bangun. Indikator program ini adalah persentase penyediaan hunian yang layak.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :

a. **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

   Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

   - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota;
   - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.

b. **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

   Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

   - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.

c. **Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**

   Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

   - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

d. **Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**

   Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

2. **Program Kawasan Permukiman**

   Program kawasan permukiman ditujukan untuk mengurangi luasan kumuh di Kota Tegal. Indikatornya adalah persentase luasan pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh yang ditentukan dari luas kawasan permukiman yang telah ditangani dibagi luas permukiman di wilayah Kota Tegal. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :

a. **Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) hektar**

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

- Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh;

b. **Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) hektar**

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh;
- Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh.

3. **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**

Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh ditujukan untuk mencegah munculnya perumahan/permukiman kumuh dan mengurangi luasan kumuh yang ada dengan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni. Indikatornya adalah persentase rumah layak huni. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :

a. **Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan PSU perumahan di Kota Tegal. Indikatornya adalah cakupan PSU perumahan yang diperoleh dari membandingkan PSU perumahan yang telah diserahkan ke pemerintah dengan total PSU perumahan yang ada di Kota Tegal. Sasaran kegiatan ini adalah PSU perumahan yang dibangun oleh pengembang dan pemakaman yang ada di Kota Tegal. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :

a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk menunjang kelancaran administrasi, pemerintahan dan program-program yang ada seperti yang tercantum di atas. Indikatornya adalah indeks kematangan organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Tabel. 4.1. Rencana Program dan Kegiatan

NO.	NAMA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
T1	**Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak**	**Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak**	**Persen**	**79,49**	**81,32**	**82,00**	**82,68**	**83,36**	**84,04**	**84,72**	**Kepala Dinas**
S1	**Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Persentase luasan perumahan dan permukiman layak huni**	**Persen**	**57,95**	**58,89**	**59,89**	**48,54**	**49,16**	**49,79**	**50,43**	**Kepala Dinas**
P1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Penyediaan Hunian Yang Layak**	**Persen**	**0,17**	**2,11** **538.285.500**	**4,21** **1.196.000.000**	**6,32** **1.196.000.000**	**8,42** **1.196.000.000**	**10,53** **1.295.000.000**	**12,63** **1.295.000.000**	**Kepala Bidang Perumahan**
A	**Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Pendataan Rumah Korban Bencana dan Rumah Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100** **6.951.500**	**100** **6.000.000**	**100** **6.000.000**	**100** **6.000.000**	**100** **6.000.000**	**100** **6.000.000**	**Kepala Bidang Perumahan**
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1 3.545.000	1 3.000.000	1 3.000.000	1 3.000.000	1 3.000.000	1 3.000.000	Kepala Bidang Perumahan
2	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1 3.406.500	1 3.000.000	1 3.000.000	1 3.000.000	1 3.000.000	1 3.000.000	Kepala Bidang Perumahan
B	**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100** **238.337.200**	**100** **285.000.000**	**100** **285.000.000**	**100** **285.000.000**	**100** **285.000.000**	**100** **285.000.000**	**Kepala Bidang Perumahan**
1	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	7	4 238.337.200	5 285.000.000	5 285.000.000	5 285.000.000	5 285.000.000	5 285.000.000	Kepala Bidang Perumahan

NO.	NAMA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
C.	**Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100 288.946.800**	**100 900.000.000**	**100 900.000.000**	**100 900.000.000**	**100 1.000.000.000**	**100 1.000.000.000**	**Kepala Bidang Perumahan**
1.	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Laporan	1	1 288.946.800	1 900.000.000	1 900.000.000	1 900.000.000	1 1.000.000.000	1 1.000.000.000	Kepala Bidang Perumahan
D.	**Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100 4.050.000**	**100 5.000.000**	**100 5.000.000**	**100 5.000.000**	**100 5.000.000**	**100 5.000.000**	**Kepala Bidang Perumahan**
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	1 4.050.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	1 5.000.000	Kepala Bidang Perumahan
P2	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Luasan Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**	**Persen**	**2,44**	**2,47 534.097.891**	**2,50 440.941.515**	**2,52 617.000.000**	**2,55 677.500.000**	**2,57 938.000.000**	**2,60 1.048.500.000**	**Kepala Bidang Kawasan Permukiman**
A.	**Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100 135.490.253**	**100 105.918.900**	**100 110.000.000**	**100 120.000.000**	**100 130.000.000**	**100 140.000.000**	**Kepala Bidang Kawasan Permukiman**
1.	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1 49.410.000	1 105.918.900	1 110.000.000	1 120.000.000	1 130.000.000	1 140.000.000	Kepala Bidang Kawasan Permukiman

NO.	NAMA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
II	**Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100** **498.607.628**	**100** **335.022.715**	**100** **507.000.000**	**100** **757.500.000**	**100** **808.000.000**	**100** **968.500.000**	**Kepala Bidang Kawasan Permukiman**
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1 8.785.600	1 8.786.600	1 7.000.000	1 7.500.000	1 8.000.000	1 8.500.000	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
2.	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Hektar	0,20	0,50 491.842.028	0,50 328.257.115	0,50 500.000.000	0,50 750.000.000	0,50 800.000.000	0,50 900.000.000	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
P3	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**Persen**	**98,84**	**97,84** **6.584.494.200**	**97,88** **3.288.655.800**	**97,93** **3.603.349.000**	**97,97** **4.138.684.100**	**98,01** **4.952.554.000**	**98,05** **5.797.810.000**	**Kepala Bidang Kawasan Permukiman**
A	**Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukimah Kumuh Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100** **6.584.494.200**	**100** **3.288.655.800**	**100** **3.603.349.000**	**100** **4.138.684.100**	**100** **4.952.554.000**	**100** **5.797.810.000**	**Kepala Bidang Kawasan Permukiman**
1.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	464	308 6.584.494.200	155 3.288.655.800	170 3.603.349.000	195 4.138.684.100	230 4.952.554.000	270 5.797.810.000	Kepala Bidang Kawasan Permukiman

NO.	NAMA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
P4	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan PSU Perumahan**	**Persen**	**63,49**	**65,00** **2.358.139.960**	**67,00** **2.593.953.400**	**69,00** **2.853.349.000**	**71,00** **3.138.684.100**	**73,00** **3.452.554.000**	**75,00** **3.797.810.000**	**Kepala Bidang Perumahan**
A.	**Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100** **2.358.139.960**	**100** **2.593.953.400**	**100** **2.853.349.000**	**100** **3.138.684.100**	**100** **3.452.554.000**	**100** **3.797.810.000**	**Kepala Bidang Perumahan**
1.	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	15	19 101.337.360	20 111.471.000	20 122.618.000	20 134.880.000	20 148.368.000	20 163.205.000	Kepala Bidang Perumahan
2.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	22	19 2.223.276.600	20 2.445.606.000	20 2.690.167.000	20 2.959.183.700	20 3.255.103.000	20 3.580.614.000	Kepala Bidang Perumahan
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	5	7 33.524.000	5 36.876.400	5 40.564.000	5 44.620.400	5 49.083.000	5 53.991.000	Kepala Bidang Perumahan
S2	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**68,65**	**68,75**	**68,85**	**68,95**	**69,15**	**69,35**	**69,55**	**Kepala Dinas**
P1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kematangan Organisasi**	**Angka**	**35**	**36** **6.193.692.495**	**37** **6.291.608.000**	**38** **6.412.908.000**	**38** **6.616.090.000**	**38** **6.897.360.000**	**39** **7.150.880.000**	**Sekretaris**
A.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100** **2.500.000**	**100** **2.500.000**	**100** **2.800.000**	**100** **2.800.000**	**100** **3.250.000**	**100** **3.250.000**	**Sekretaris**
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4 1.000.000	3 1.000.000	3 1.100.000	3 1.100.000	3 1.250.000	3 1.250.000	Sekretaris

NO.	NAMA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	2	2 1.000.000	2 1.000.000	2 1.100.000	2 1.100.000	2 1.250.000	2 1.250.000	Sekretaris
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1 500.000	1 600.000	1 600.000	1 600.000	1 750.000	1 750.000	Sekretaris
B.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100** **4.160.833.567**	**100** **4.144.008.000**	**100** **4.245.458.000**	**100** **4.408.040.000**	**100** **4.666.510.000**	**100** **4.809.980.000**	**Sekretaris**
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	30	35 4.110.583.567	35 4.093.758.000	35 4.194.458.000	35 4.356.040.000	35 4.613.010.000	35 4.754.980.000	Sekretaris
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12 50.250.000	12 50.250.000	12 51.000.000	12 52.000.000	12 53.500.000	12 55.000.000	Sekretaris
C.	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100** **3.300.000**	**100** **3.300.000**	**100** **3.500.000**	**100** **3.750.000**	**100** **4.000.000**	**100** **4.300.000**	**Sekretaris**
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12 3.300.000	12 3.300.000	12 3.500.000	12 3.750.000	12 4.000.000	12 4.300.000	Sekretaris
D.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100** **156.872.300**	**100** **200.800.000**	**100** **202.650.000**	**100** **229.500.000**	**100** **231.600.000**	**100** **259.350.000**	**Sekretaris**
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5 1.253.000	5 1.300.000	5 1.400.000	5 1.500.000	5 1.700.000	5 1.950.000	Sekretaris
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	35	37 21.882.400	37 22.000.000	37 22.500.000	37 23.000.000	37 23.500.000	37 24.000.000	Sekretaris

NO.	NAMA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	34	34 18.389.100	34 19.000.000	34 19.500.000	34 20.000.000	34 20.500.000	34 21.000.000	Sekretaris
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1 19.200.000	1 19.500.000	1 19.750.000	1 20.000.000	1 20.400.000	1 20.900.000	Sekretaris
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4 10.097.900	4 10.250.000	4 10.500.000	4 10.750.000	4 11.000.000	4 11.500.000	Sekretaris
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12 3.550.000	12 3.750.000	12 4.000.000	12 4.250.000	12 4.500.000	12 5.000.000	Sekretaris
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12 62.500.000	12 125.000.000	12 125.000.000	12 150.000.000	12 150.000.000	12 175.000.000	Sekretaris
E.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100 1.663.136.528**	**100 1.670.000.000**	**100 1.685.000.000**	**100 1.707.000.000**	**100 1.730.000.000**	**100 1.750.000.000**	**Sekretaris**
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3 837.930.000	3 840.000.000	3 850.000.000	3 860.000.000	3 875.000.000	3 890.000.000	Sekretaris
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12 825.206.628	12 830.000.000	12 835.000.000	12 847.000.000	12 855.000.000	12 860.000.000	Sekretaris
F.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100 197.050.000**	**100 205.000.000**	**100 213.500.000**	**100 221.000.000**	**100 228.000.000**	**100 236.000.000**	**Sekretaris**
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9 57.150.000	9 60.000.000	9 63.0000.000	9 65.520.000	9 67.500.000	9 70.000.000	Sekretaris

NO.	NAMA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	54	60 82.750.000	80 85.000.000	80 87.500.000	80 90.000.000	80 93.000.000	80 96.000.000	Sekretaris
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1 57.150.000	1 60.000.000	1 63.000.000	1 65.500.000	1 67.500.000	1 70.000.000	Sekretaris
G.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terfasilitasi**	**Persen**	**100**	**100** **30.000.000**	**100** **66.000.000**	**100** **60.000.000**	**100** **44.000.000**	**100** **34.000.000**	**100** **88.000.000**	**Sekretaris**
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	-	2 30.000.000	9 66.000.000	4 60.000.000	6 44.000.000	4 34.000.000	8 88.000.000	Sekretaris

Tabel 4.2
Metadata (Formulasi) Indikator Tujuan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Tujuan	Rumus
1.	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	$\frac{Jumlah\ rumah\ dengan\ akses\ hunian\ layak}{Jumlah\ rumah\ tangga\ di\ Kota\ Tegal} \times 100\%$

Tabel 4.3.
Metadata (Formulasi) Indikator Sasaran
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Sasaran	Rumus
1.	Persentase luasan perumahan dan permukiman layak huni	$\frac{Luasan\ perumahan\ dan\ permukiman\ layak\ huni}{Luas\ Kota\ Tegal} \times 100\%$
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Tegal*

Tabel 4.4.
Metadata (Formulasi) Program
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Program	Rumus
1.	Persentase penyediaan hunian yang layak	$\frac{Rumah\ layak\ huni\ yang\ disediakan}{Jumlah\ kebutuhan\ akan\ rumah\ yang\ belum\ terpenuhi} \times 100\%$
2.	Persentase luasan pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh	$\frac{Luas\ kawasan\ permukiman\ yang\ ditangani}{Luas\ Kota\ Tegal} \times 100\%$
3.	Persentase rumah layak huni	$\frac{Jumlah\ rumah\ layak\ huni}{Jumlah\ rumah\ di\ Kota\ Tegal} \times 100\%$
4.	Cakupan PSU Perumahan	$\frac{Jumlah\ PSU\ Perumahan\ yang\ telah\ diserahkan}{Jumlah\ PSU\ Perumahan\ di\ Kota\ Tegal} \times 100\%$
5.	Indeks Kematangan Organisasi	*Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOD)*

Dari tabel tersebut metadata atau formulasi rumus yang digunakan dapat digunakan untuk menghitung target rasio dari masing-masing indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator program Tahun 2025 hingga tahun 2029.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan Penetapan IKU untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran *(output)*, hasil *(outcome)* dan dampak *(impact)*.

Keluaran *(output)* adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil *(outcome)* dapat terwujud. Hasil *(outcome)* adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak *(impact)* adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* beberapa program. Indikator adalah suatu alat ukur untuk menggambarkan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika melakukan perencanaan awal. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan program pembangunan jangka menengah daerah. Indikator dan target kinerja dinyatakan secara jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

4.2.1. Pohon Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman



Gambar 4.1. Pohon Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dikaitkan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Penetapan Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	Persen	79,49	81,32	82,00	82,68	83,36	84,04	84,72
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	68,65	68,75	68,85	68,95	69,15	69,35	69,55

Dari tabel 4.5 tersebut dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal terdapat 2 indikator yaitu persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan. Untuk indikator persentase rumah tangga dengan akses hunian layak ditunjang dengan Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Untuk indikator meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4.2.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal.

Tabel 4.6.
Penetapan Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	Persen	0	0	0	0	0	0,09
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	Persen	1,24	1,35	1,46	1,58	1,69	1,80
3.	Luasan Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar di kabupaten/ kota yang tertangani	Persen	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
4.	Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persen	0,44	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
5.	Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persen	50,56	56,17	61,79	67,41	73,30	78,65

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk urusan perumahan dan permukiman terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Kunci **(IKK)** yang digunakan untuk membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan. Indikator kunci tersebut yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota, fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota, luasan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar di kabupaten/kota yang tertangani, berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal disusun sebagai arahan pelayanan dinas dalam 5 (lima) tahun mendatang dan dijadikan pedoman di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal dalam menyusun rencana kerja tahunan, anggaran dinas, rencana program dan rencana kegiatan. Peran serta dari semua pihak penyelenggara pembangunan akan turut menentukan pencapaian target kinerja dalam mendukung Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2025 – 2029 ini. Dalam hal ini Renstra dapat digunakan sebagai dasar penilaian atau evaluasi atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, upaya maksimal serta kesungguhan dari semua pihak sangat diperlukan agar seluruh rencana ini dapat diwujudkan.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025 - 2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama dengan baik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan outcome program dan kegiatan dalam Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian dokumen ini disusun, semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahNya kepada kita semua, Aamiin.

Tegal, 18 September 2025

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Tegal

Ir. EKO SETYAWAN, MUM
NIP. 19650920 199603 1 001

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KOTA TEGAL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman											
- Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak	Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)	79.49	81.52	82.00	82.84	83.92	84.04	84.72	
		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase lokasi perumahan dan permukiman layak huni (Point)	37.00	39.89	39.89	42.84	45.19	49.79	55.43	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	68.00	68.75	68.85	68.93	69.13	69.35	69.55	

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TEGAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					13.611.108.915,00		14.882.936.000,00		15.906.808.200,00		17.096.466.000,00		19.097.880.000,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.201.808.000,00		6.412.300.000,00		6.615.088.000,00		6.897.360.000,00		7.100.880.000,00	
Meningkatnya Kemasangan Organisasi	Indeks Kemasangan Organisasi Perangkat Daerah (Indeks)	00	99	97	6.201.808.000,00	98	6.412.300.000,00	98	6.615.088.000,00	99	6.897.360.000,00	99	7.100.880.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.196.000.000,00		1.196.000.000,00		1.196.000.000,00		1.296.000.000,00		1.296.000.000,00	
Meningkatnya Penyediaan Hunian Yang Layak	Persentase Penyediaan Hunian Yang Layak (%)	3,17	3,11	4,21	1.196.000.000,00	8,32	1.196.000.000,00	8,42	1.196.000.000,00	10,53	1.296.000.000,00	12,63	1.296.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					440.941.915,00		917.000.000,00		677.920.000,00		399.000.000,00		1.048.880.000,00	
Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luasan Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh (%)	2,44	2,47	2,50	440.941.915,00	2,52	917.000.000,00	2,55	677.920.000,00	2,57	399.000.000,00	2,59	1.048.880.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					3.269.600.600,00		3.909.348.000,00		4.138.884.100,00		4.262.844.000,00		5.797.810.000,00	
Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni (%)	68,84	67,84	67,68	3.269.600.600,00	87,04	3.909.348.000,00	92,21	4.138.884.100,00	88,21	4.262.844.000,00	66,0%	5.797.810.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENANGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					2.933.853.400,00		2.853.348.000,00		3.109.934.100,00		3.402.334.000,00		3.797.810.000,00	
Meningkatnya Cakupan PSU Perumahan	Cakupan PSU Perumahan (%)	63,49	68,00	67,00	2.933.853.400,00	69,00	2.853.348.000,00	71,00	3.109.934.100,00	73,00	3.402.334.000,00	75,00	3.797.810.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
TOTAL KESELURUHAN					13611108915,00		14882936000,00		15906808200,00		17096466000,00		19097880000,00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA TEGAL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
- Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak	Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)		
		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman			Persentase luasan perumahan dan permukiman layak huni (Persen)		
			Meningkatnya Penyediaan Hunian Yang Layak		Persentase Penyediaan Hunian Yang Layak (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Terfasilitasinya Pendataan Rumah Korban Bencana dan Rumah Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05.0002 - Pendatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terfasilitasinya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh			1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Terfasilitasinya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
				Terfasilitasinya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Penugasan/Penerapan Permukiman Kumuh (Laporan)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Luas Permukiman Kumuh yang Digugur (Ha)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Penugasan/Penerapan Permukiman Kumuh (Laporan)	1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Penugasan/Penerapan Permukiman Kumuh	
					Luas Permukiman Kumuh yang Digugur (Ha)	1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Penugasan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Meningkatnya Rumah Layak Huni		Persentase Rumah Layak Huni (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Terfasilitasinya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukimah Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Disediakan (Unit Rumah)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Meningkatnya Cakupan PSU Perumahan		Cakupan PSU Perumahan (%)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Terfasilitasinya Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Kematangan Organisasi		Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Indeks)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terfasilitasinya Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terfasilitasinya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terfasilitasinya Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Penataan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.2.06.0006 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.2.09.0031 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Meningkatnya Kemampuan Organisasi	Indeks Kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (Indeks)	36	37	6.291.000.000,00	38	[illegible]	39	[illegible]	39	[illegible]	40	[illegible]	[illegible]	
1.04.01.2.01 - Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	2.590.000,00	1	2.800.000,00	1	2.800.000,00	1	3.240.000,00	1	3.256.000,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kompilasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.240.000,00		1.256.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	1.000.000,00	3	1.100.000,00	3	1.100.000,00	3	1.240.000,00	3	1.256.000,00		
1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.000.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.240.000,00		1.256.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kompilasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kompilasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.000.000,00	2	1.100.000,00	2	1.100.000,00	2	1.240.000,00	2	1.256.000,00		
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000,00		500.000,00		600.000,00		750.000,00		750.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	300.000,00	1	500.000,00	1	600.000,00	1	750.000,00	1	750.000,00		
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.144.000.000,00		4.245.400.000,00		4.400.040.000,00		4.656.510.000,00		4.800.960.000,00		
Terselenggaranya Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	2.144.000.000,00	12	4.245.400.000,00	12	4.400.040.000,00	12	4.656.510.000,00	12	4.800.960.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	36		36		36		36		36			
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.091.750.000,00		4.194.400.000,00		4.350.040.000,00		4.611.010.000,00		4.754.960.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/tahun)	35	35	4.091.750.000,00	35	4.194.400.000,00	35	4.350.040.000,00	35	4.611.010.000,00	35	4.754.960.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				56.290.000,00		61.000.000,00		62.500.000,00		63.500.000,00		65.000.000,00		
Terlaksanannya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	56.290.000,00	12	61.000.000,00	12	62.500.000,00	12	63.500.000,00	12	65.000.000,00		
1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.500.000,00		3.500.000,00		3.750.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	3.500.000,00	12	3.500.000,00	12	3.750.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00		
1.04.01.2.03.0006 - Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.500.000,00		3.500.000,00		3.750.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	3.500.000,00	12	3.500.000,00	12	3.750.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00		
1.04.01.2.20 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				200.930.000,00		202.500.000,00		229.000.000,00		231.000.000,00		239.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Umum	Jumlah Laporan Gaji dan Kompensasi Tenaga (Laporan)	12	12	200.930.000,00	12	202.500.000,00	12	229.000.000,00	12	231.000.000,00	12	239.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	65	57		57		57		57		57			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	34	34		34		34		34		34			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
1.04.01.2.20.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.300.000,00		1.400.000,00		1.500.000,00		1.700.000,00		1.850.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	1.300.000,00	5	1.400.000,00	5	1.500.000,00	5	1.700.000,00	5	1.850.000,00		
1.04.01.2.20.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.000.000,00		22.500.000,00		23.000.000,00		23.500.000,00		24.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	65	57	22.000.000,00	57	22.500.000,00	57	23.000.000,00	57	23.500.000,00	57	24.000.000,00		
1.04.01.2.20.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.000.000,00		19.500.000,00		20.000.000,00		20.500.000,00		21.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	34	34	19.000.000,00	34	19.500.000,00	34	20.000.000,00	34	20.500.000,00	34	21.000.000,00		
1.04.01.2.20.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.930.000,00		19.750.000,00		20.000.000,00		20.400.000,00		20.800.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	19.930.000,00	1	19.750.000,00	1	20.000.000,00	1	20.400.000,00	1	20.800.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.36.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.350.000,00		10.000.000,00		10.750.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
Terlaksanya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	10.350.000,00	4	10.000.000,00	4	10.750.000,00	4	11.000.000,00	4	11.000.000,00		
1.04.01.2.36.0006 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.750.000,00		4.000.000,00		4.250.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		
Terfasilitasinya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	5.750.000,00	12	4.000.000,00	12	4.250.000,00	12	4.500.000,00	12	5.000.000,00		
1.04.01.2.36.0008 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksanakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	125.000.000,00	12	125.000.000,00	12	150.000.000,00	12	160.000.000,00	12	175.000.000,00		
1.04.01.2.37 - Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80.000.000,00		90.000.000,00		44.500.000,00		34.000.000,00		88.000.000,00		
Terfasilitasinya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diverifikasi (Unit)	9	9	80.000.000,00	4	90.000.000,00	9	44.500.000,00	4	34.000.000,00	9	88.000.000,00		
1.04.01.2.37.0005 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000,00		90.000.000,00		44.000.000,00		34.000.000,00		88.000.000,00		
Terwadahinya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	9	80.000.000,00	4	90.000.000,00	9	44.000.000,00	4	34.000.000,00	9	88.000.000,00		
1.04.01.2.39 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.870.000.000,00		1.880.000.000,00		1.707.000.000,00		1.730.000.000,00		1.750.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.870.000.000,00	12	1.880.000.000,00	12	1.707.000.000,00	12	1.730.000.000,00	12	1.750.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
1.04.01.2.39.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				840.000.000,00		850.000.000,00		860.000.000,00		870.000.000,00		880.000.000,00		
Terwadahinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	840.000.000,00	3	850.000.000,00	3	860.000.000,00	3	870.000.000,00	3	880.000.000,00		
1.04.01.2.39.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				830.000.000,00		850.000.000,00		847.000.000,00		860.000.000,00		870.000.000,00		
Terwadahinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	830.000.000,00	12	850.000.000,00	12	847.000.000,00	12	860.000.000,00	12	870.000.000,00		
1.04.01.2.39 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.000.000,00		210.000.000,00		221.000.000,00		226.000.000,00		236.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	84	90	200.000.000,00	90	210.000.000,00	90	221.000.000,00	90	226.000.000,00	90	236.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dilayankan Pajaknya (Unit)	9	9		9		9		9		9			
1.04.01.2.39.0001 - Pemeliharaan Alat Pemeliharaan, Alat Pelek Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.000.000,00		90.000.000,00		90.850.000,00		97.500.000,00		70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggara Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9	65.000.500,00	9	67.500.000,00	9	69.580.000,00	9	67.550.000,00	9	70.000.000,00		
1.04.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.000.500,00		67.500.000,00		69.580.000,00		67.550.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	64	65	65.000.000,00	65	67.500.000,00	65	69.000.000,00	65	67.000.000,00	65	69.000.000,00		
1.04.01.2.09.0008 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				65.000.500,00		67.500.000,00		69.580.000,00		67.550.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	65.000.500,00	1	67.500.000,00	1	69.580.000,00	1	67.550.000,00	1	70.000.000,00		
1.04.01 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		
Meningkatnya Penyediaan Hunian Yang Layak	Persentase Penyediaan Hunian Yang Layak (%)	0,17	4,21	1.100.000.000,00	4,52	1.100.000.000,00	8,42	1.100.000.000,00	12,51	1.200.000.000,00	12,51	1.200.000.000,00	1.04.0.00.0.00.01.00 - 03 - Dinas Penataan dan Pengelola Pemukiman	
1.04.01.2.01 - Pelaksanaan Penyelesaian dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan Rumah Korban Bencana dan Rumah Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.01.0007 - Identifikasi Penerimaan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				5.000.500,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.01.2.01.0023 - Identifikasi Penerimaan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	5.000.500,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.01.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				290.000.000,00		290.000.000,00		290.000.000,00		290.000.000,00		290.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	7	5	290.000.000,00	5	290.000.000,00	5	290.000.000,00	5	290.000.000,00	5	290.000.000,00		
1.04.01.2.03.0003 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		
Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	7	5	280.000.500,00	5	280.000.000,00	5	280.000.000,00	5	280.000.000,00	5	280.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.04.02.2.05.0002 - Fasilitasi/bantuan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemanfaatan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.04.02.2.06 - Penerbitan dan Pembatalan Izin Pengembangan Perumahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terfasilitasinya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				940.941.815,00		917.000.000,00		877.800.000,00		936.000.000,00		1.040.000.000,00		
Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luasan Penanganan dan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh (%)	2,41	2,50	140.941.815,00	2,52	817.000.000,00	2,55	877.800.000,00	2,57	936.000.000,00	2,60	1.040.000.000,00	1.04.0.00.0.00.01.00 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.03 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 15 (Sepuluh) Ha				150.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Terfasilitasinya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00		
1.04.03.2.03.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				150.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Terfasilitasinya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				595.922.715,00		607.000.000,00		757.800.000,00		806.000.000,00		900.000.000,00		
Terfasilitasinya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani (Ha)	0,20	0,50	595.922.715,00	0,50	607.000.000,00	0,50	757.800.000,00	0,50	806.000.000,00	0,50	900.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Perlugasan/Perencanaan Permukiman Kumuh				4.795.600,00		7.000.000,00		7.800.000,00		8.000.000,00		9.600.000,00		
Terkoordinasinya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Perlugasan/Perencanaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Perlugasan/Perencanaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1	1	4.795.600,00	1	7.000.000,00	1	7.800.000,00	1	8.000.000,00	1	9.600.000,00		
1.04.01.2.03.0013 - Pelaksanaan Perlugasan Kawasan Permukiman Kumuh				328.297.115,00		900.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00		900.000.000,00		
Terlaksananya Perlugasan di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani (Ha)	0,00	0,00	328.297.115,00	0,90	900.000.000,00	0,80	700.000.000,00	0,80	800.000.000,00	0,90	900.000.000,00		
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				3.288.000.000,00		3.803.348.000,00		4.138.884.100,00		4.852.554.000,00		5.797.810.000,00		
Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni (%)	96,84	97,56	3.288.000.000,00	97,91	3.803.348.000,00	97,97	4.138.884.100,00	98,01	4.852.554.000,00	98,04	5.797.810.000,00	1.04.0.02.0.00.01.00 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.04.2.01 - Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				3.288.000.000,00		3.803.348.000,00		4.138.884.100,00		4.852.554.000,00		5.797.810.000,00		
Terfasilitasinya Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pemugaran Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Difasilitasi (Unit Rumah)	464	195	3.288.000.000,00	170	3.803.348.000,00	185	4.138.884.100,00	230	4.852.554.000,00	270	5.797.810.000,00		
1.04.01.2.01.0001 - Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				3.288.000.000,00		3.803.348.000,00		4.138.884.100,00		4.852.554.000,00		5.797.810.000,00		
Terfasilitasinya Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Difasilitasi (Unit Rumah)	464	195	3.288.000.000,00	170	3.803.348.000,00	185	4.138.884.100,00	230	4.852.554.000,00	270	5.797.810.000,00		
1.04.05 - PROGRAM PENGINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM				2.915.965.885,00		2.803.348.000,00		3.138.884.100,00		3.452.554.000,00		3.797.810.000,00		
Meningkatnya Cakupan PSU Perumahan	Cakupan PSU Perumahan (%)	63,49	67,00	2.915.965.400,00	69,00	2.803.348.000,00	71,00	3.138.884.100,00	73,00	3.452.554.000,00	75,00	3.797.810.000,00	1.04.0.02.0.00.01.00 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				2.915.965.400,00		2.803.348.000,00		3.138.884.100,00		3.452.554.000,00		3.797.810.000,00		
Terfasilitasinya Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penyelesaian PSU Perumahan (Dokumen)	19	20	2.915.965.400,00	20	2.803.348.000,00	20	3.138.884.100,00	20	3.452.554.000,00	20	3.797.810.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	27	20		20		20		20		20			
1.04.02.2.01.0001 - Penyediaan Penyediaan PSU Perumahan				111.471.000,00		122.618.100,00		134.880.000,00		148.368.000,00		163.205.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	10	20	111.471.000,00	20	122.618.100,00	20	134.880.000,00	20	148.368.000,00	20	163.205.000,00		
1.04.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				36.670.400,00		40.064.000,00		44.070.400,00		48.080.000,00		53.001.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Fasilitasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	5	5	36.670.400,00	5	40.064.000,00	5	44.070.400,00	5	48.080.000,00	5	53.001.000,00		
1.04.02.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				2.445.695.040,00		2.690.767.000,00		2.959.143.700,00		3.255.101.000,00		3.580.614.000,00		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	20	20	2.445.695.040,00	20	2.690.767.000,00	20	2.959.143.700,00	20	3.255.101.000,00	20	3.580.614.000,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL

SASARAN URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH																
3.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkatnya Kemelangan Organisasi	Indeks Kemelangan Organisasi Perangkat Daerah (Indeks)	91	92	93		94		95		96		97		1.04.0.00.0.00.01.0001 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															KOTA TEGAL	
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	4	3		3		3		3		3				
1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															KOTA TEGAL	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															KOTA TEGAL	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terfasilitasinya Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12	4.144.908.000,00	12	4.345.455.000,00	12	4.469.040.000,00	12	4.606.510.000,00	12	4.809.500.000,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	35	35	35		35		35		35		35				
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.083.758.000,00		4.194.455.000,00		4.388.040.000,00		4.613.010.000,00		4.754.960.000,00		KOTA TEGAL	
Terlaksanya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	35	35	35	4.083.758.000,00	35	4.194.455.000,00	35	4.388.040.000,00	35	4.613.010.000,00	35	4.754.960.000,00			
1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD					80.250.000,00		91.000.000,00		82.000.000,00		83.500.000,00		80.000.000,00		KOTA TEGAL	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12	80.250.000,00	12	91.000.000,00	12	82.000.000,00	12	83.500.000,00	12	80.000.000,00			
1.04.01.2.03 - Administasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.300.000,00		5.800.000,00		3.790.000,00		4.000.000,00		4.800.000,00			
Terfasilitasinya Administasi barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12	3.300.000,00	12	5.800.000,00	12	3.790.000,00	12	4.000.000,00	12	4.800.000,00			
1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					3.300.000,00		5.800.000,00		3.790.000,00		4.000.000,00		4.800.000,00		KOTA TEGAL	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	12	3.300.000,00	12	5.800.000,00	12	3.790.000,00	12	4.000.000,00	12	4.800.000,00			
1.04.01.2.36 - Administasi Umum Perangkat Daerah					208.800.000,00		262.000.000,00		229.590.000,00		231.600.000,00		259.300.000,00			
Terfasilitasinya Administasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tata Laporan)	12	12	12	208.800.000,00	12	262.000.000,00	12	229.590.000,00	12	231.600.000,00	12	259.300.000,00			
	Jumlah Fasilitasi Penataan Rumah Tangga yang Dioptimalkan (Paket)	34	34	34		34		34		34		34				
	Jumlah Fasilitasi Penataan dan Pelengkapan Kantor yang Dioptimalkan (Paket)	37	37	37		37		37		37		37				
	Jumlah Fasilitasi Kompensasi Insentif Lainnya/Penerangan Bangunan Kantor yang Dioptimalkan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Hasil Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Hasil Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.700.000,00		1.800.000,00		1.900.000,00		1.700.000,00		1.850.000,00		KOTA TEGAL	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Hasil Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	5	1.700.000,00	5	1.800.000,00	5	1.900.000,00	5	1.700.000,00	5	1.850.000,00			
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					22.000.000,00		22.000.000,00		21.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		KOTA TEGAL	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Hasil Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	37	37	37	22.000.000,00	37	22.000.000,00	37	21.000.000,00	37	23.000.000,00	37	24.000.000,00			
1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					19.000.000,00		19.800.000,00		20.000.000,00		20.900.000,00		21.000.000,00		KOTA TEGAL	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Hasil Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	54	54	54	19.000.000,00	54	19.800.000,00	54	20.000.000,00	54	20.900.000,00	54	21.000.000,00			
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12.500.000,00		15.750.000,00		20.000.000,00		20.400.000,00		20.000.000,00		KOTA TEGAL	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Hasil Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	10.000.000,00	1	10.750.000,00	1	20.000.000,00	1	20.400.000,00	1	20.000.000,00			
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.200.000,00		10.500.000,00		10.700.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		KOTA TEGAL	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Hasil Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4	10.200.000,00	4	10.500.000,00	4	10.700.000,00	4	11.000.000,00	4	11.000.000,00			
1.04.01.2.06.0006 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					3.700.000,00		4.000.000,00		4.200.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		KOTA TEGAL	
Terfasilitasinya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12	3.700.000,00	12	4.000.000,00	12	4.200.000,00	12	4.500.000,00	12	5.000.000,00			
1.04.01.2.06.0018 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					125.000.000,00		135.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		KOTA TEGAL	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	125.000.000,00	12	125.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	175.000.000,00			
1.04.01.2.27 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					35.000.000,00		40.000.000,00		44.000.000,00		48.000.000,00		55.000.000,00			
Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan (Unit)	6	3	3	35.000.000,00	4	40.000.000,00	5	44.000.000,00	4	48.000.000,00	6	55.000.000,00			
1.04.01.2.27.0005 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35.000.000,00		40.000.000,00		44.000.000,00		48.000.000,00		55.000.000,00	KOTA TEGAL	
Terwadahinya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diwadahkan (Unit)	0	3	3	35.000.000,00	4	40.000.000,00	5	44.000.000,00	4	48.000.000,00	6	55.000.000,00			
1.04.01.2.28 - Pemeliharaan Alat Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.470.000.000,00		1.545.000.000,00		1.737.000.000,00		1.910.000.000,00		1.760.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyelesaian Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	5	5	1.470.000.000,00	5	1.545.000.000,00	5	1.737.000.000,00	5	1.910.000.000,00	5	1.760.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
1.04.01.2.28.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					840.000.000,00		882.000.000,00		969.000.000,00		875.000.000,00		880.000.000,00	KOTA TEGAL	
Terwadahinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	5	5	840.000.000,00	5	882.000.000,00	5	969.000.000,00	5	875.000.000,00	5	880.000.000,00			
1.04.01.2.28.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					630.000.000,00		635.000.000,00		647.000.000,00		655.000.000,00		880.000.000,00	KOTA TEGAL	
Terwadahinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	630.000.000,00	12	635.000.000,00	12	647.000.000,00	12	655.000.000,00	12	880.000.000,00			
1.04.01.2.30 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					205.000.000,00		215.000.000,00		221.000.000,00		228.000.000,00		230.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	205.000.000,00	1	215.000.000,00	1	221.000.000,00	1	228.000.000,00	1	230.000.000,00			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	54	60	60		60		60		60		60				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Kendaraan Pemerangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dioperasikan dan dimanfaatkan Pejabat/Unit	9	9	9		9		9		9		9				
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pemerangan Dinas atau Pemberian Dinas Jabatan					60.000.000,00		65.000.000,00		69.500.000,00		67.500.000,00		70.000.000,00	KOTA TEGAL	
Terlaksanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemerangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pemerangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dioperasikan dan dimanfaatkan Pejabat/Unit	9	9	9	60.000.000,00	9	65.000.000,00	9	69.500.000,00	9	67.500.000,00	9	70.000.000,00			
1.04.01.2.06.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					45.000.000,00		47.500.000,00		50.000.000,00		52.500.000,00		55.000.000,00	KOTA TEGAL	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	34	60	60	45.000.000,00	60	47.500.000,00	60	50.000.000,00	60	52.500.000,00	60	55.000.000,00			
1.04.01.2.06.0025 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					65.000.000,00		67.500.000,00		69.500.000,00		67.500.000,00		70.000.000,00	KOTA TEGAL	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	65.000.000,00	1	67.500.000,00	1	69.500.000,00	1	67.500.000,00	1	70.000.000,00			
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.240.000.000,00		1.190.000.000,00		1.190.000.000,00		1.240.000.000,00		1.240.000.000,00			
Meningkatnya Penyediaan Hunian Yang Layak	Persentase Penyediaan Hunian Yang Layak (%)	0,11	2,11	4,21	1.190.000.000,00	6,32	1.190.000.000,00	8,42	1.190.000.000,00	10,53	1.240.000.000,00	12,63	1.240.000.000,00	1.04.0.00.0.00.01.02 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.04.02.2.01 - Penyediaan Penyelidikan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan Rumah Korban Bencana dan Rumah Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	0.000.000,00	1	0.000.000,00	1	0.000.000,00	1	0.000.000,00	1	0.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
1.04.02.2.01.0007 - Bantuan Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00	KOTA TEGAL	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(27)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Terpadat Tertinggi Berbasis Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Terpadat Tertinggi Berbasis Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	5.000.000.00	1	5.000.000.00	1	5.000.000.00	1	5.000.000.00	1	5.000.000.00			
1.04.02.2.01.0026 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					5.000.000.00		5.000.000.00		5.000.000.00		5.000.000.00		5.000.000.00		KOTA TEGAL	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]			
1.04.02.2.02 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					285.500.500.00		285.000.000.00		285.000.000.00		285.000.000.00		285.000.000.00			
Terfasilitasinya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1	4	5	285.000.000.00	5	285.000.000.00	5	285.000.000.00	5	285.000.000.00	5	285.000.000.00			
1.04.02.2.02.0008 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota					285.500.000.00		285.000.000.00		285.000.000.00		285.000.000.00		285.000.000.00		KOTA TEGAL	
Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	2	4	5	285.500.000.00	5	285.000.000.00	5	285.000.000.00	5	285.000.000.00	5	285.000.000.00			
1.04.02.2.10 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					900.500.500.00		900.000.000.00		900.000.000.00		1.000.000.000.00		1.000.000.000.00			
Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	1	900.500.500.00	1	900.000.000.00	1	900.000.000.00	1	1.000.000.000.00	1	1.000.000.000.00			
1.04.02.2.10.0002 - Pemberdayaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					900.500.500.00		900.000.000.00		900.000.000.00		1.000.000.000.00		1.000.000.000.00		KOTA TEGAL	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]			
1.04.02.2.06 - Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan					5.000.500.00		5.000.500.00		5.000.000.00		5.000.000.00		5.000.000.00			
Terfasilitasinya Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian, Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1	1	1	5.000.500.00	1	5.000.500.00	1	5.000.000.00	1	5.000.000.00	1	5.000.000.00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04.02.2.36.0025 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					5.050.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KOTA TEGAL	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	1	1	1	5.050.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					442.947.815,00		617.500.000,00		477.500.000,00		498.000.000,00		1.525.500.000,00			
Terkendalinya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luasan Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh (%)	2,44	2,41	2,35	440.941.815,00	2,32	617.500.000,00	2,29	477.500.000,00	2,27	500.000.000,00	2,20	1.525.500.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0001 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.04.03.2.32 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					105.910.900,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00			
Terfasilitasinya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penataan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1	1	1	105.910.900,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00			
1.04.03.2.32.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh					105.910.900,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		KOTA TEGAL	
Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1	1	1	105.910.900,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00			
1.04.03.2.33 - Pencegahan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					336.322.715,00		507.000.000,00		757.500.000,00		808.000.000,00		808.500.000,00			
Terfasilitasinya Pencegahan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemogokan/Pencegahan Permukiman Kumuh (Laporan)	1	1	1	336.322.715,00	1	507.000.000,00	1	757.500.000,00	1	808.000.000,00	1	808.500.000,00			
	Luas Permukiman Kumuh yang Dijaga (Ha)	0,20	0,50	0,50		0,50		0,50		0,50		0,50				
1.04.03.2.33.0006 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemogokan/Pencegahan Permukiman Kumuh					6.755.900,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		KOTA TEGAL	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(0)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)	(-1)	(-2)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penyelenggaraan Perlindungan/Penetapan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Perlindungan/Penetapan Permukiman Kumuh (Laporan)	1	1	1	8.755.000.00	1	7.000.000.00	1	7.840.000.00	1	8.000.000.00	1	8.000.000.00			
1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Permukiman Kumuh					326.257.110.00		900.000.000.00		700.000.000.00		600.000.000.00		900.000.000.00		6213 TEGAL	
Terlaksananya Penyediaan di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dijaga (Ha)	0.20	0.50	0.50	326.257.110.00	0.55	900.000.000.00	0.70	700.000.000.00	0.70	600.000.000.00	0.70	900.000.000.00			
1.04.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.268.000.000.00		3.900.000.000.00		4.130.004.100.00		4.952.554.000.00		5.707.910.000.00			
Menyediakan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni (%)	96,64	97,64	97,98	1.268.000.000.00	97,64	3.900.000.000.00	97,97	4.130.004.100.00	98,31	4.952.554.000.00	98,98	5.707.910.000.00	1.04.0.00.0.00.01.00.00 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.04.04.2.01 - Pemeliharaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					1.268.000.000.00		3.900.000.000.00		4.130.004.100.00		4.952.554.000.00		5.707.910.000.00			
Terfasilitasinya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipelihara (Unit Rumah)	404	359	193	1.268.000.000.00	170	3.900.000.000.00	199	4.130.004.100.00	230	4.952.554.000.00	270	5.707.910.000.00			
1.04.04.2.01.0001 - Pelayanan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					1.268.000.000.00		3.900.000.000.00		4.130.004.100.00		4.952.554.000.00		5.707.910.000.00		6213 TEGAL	
Terlaksananya Pelayanan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipelihara (Unit Rumah)	404	359	193	1.268.000.000.00	170	3.900.000.000.00	199	4.130.004.100.00	230	4.952.554.000.00	270	5.707.910.000.00			
1.04.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN, SANITASI DAN UTILITAS UMUM (PSU)					2.543.954.406.00		2.467.560.402.00		3.139.004.100.00		3.452.554.000.00		5.707.910.000.00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Cakupan PSU Perumahan	Cakupan PSU Perkotaan (%)	53,49	46,00	47,00	2.553.953.406,00	69,00	2.953.345.000,00	71,00	3.136.884.100,00	73,00	3.452.554.000,00	75,00	3.797.810.000,00	1.04.0.00.0.DC.01.00 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.04.00.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					2.553.953.406,00		2.953.345.000,00		3.136.884.100,00		3.452.554.000,00		3.797.810.000,00			
Terfasilitasinya Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	15	16	20	2.553.953.406,00	20	2.953.345.000,00	20	3.136.884.100,00	20	3.452.554.000,00	20	3.797.810.000,00			
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	22	18	24		20		20		20		20				
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	6	7	8		6		6		6		6				
1.04.00.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan					111.471.000,00		122.618.000,00		134.880.000,00		148.368.000,00		163.205.000,00		KOTA TEGAL	
Terkoordinirnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	15	16	20	111.471.000,00	20	122.618.000,00	20	134.880.000,00	20	148.368.000,00	20	163.205.000,00			
1.04.00.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					36.876.406,00		40.564.000,00		44.620.400,00		49.083.000,00		53.991.000,00		KOTA TEGAL	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	5	7	8	36.876.406,00	5	40.564.000,00	5	44.620.400,00	5	49.083.000,00	5	53.991.000,00			
1.04.00.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan					2.445.606.000,00		2.990.167.000,00		2.998.183.700,00		3.255.103.000,00		3.580.614.000,00		KOTA TEGAL	
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	22	18	24	2.445.606.000,00	20	2.990.167.000,00	20	2.998.183.700,00	20	3.255.103.000,00	20	3.580.614.000,00			

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KOTA TEGAL

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	NIHIL									

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KOTA TEGAL

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA TEGAL

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman									
2.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	79,49	61,32	62,00	62,68	63,36	64,04	64,72	
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	68,65	68,75	68,85	68,95	69,15	69,35	69,55	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA TEGAL

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										